

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 72 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 September 2022

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Target Percepatan Penurunan *Stunting*

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
			2022	2023	2024		
1.	Tersedianya layanan intervensi spesifik	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan makanan.	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan	DKBP3A, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
		2. Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	75%	80%	80%	Dinas Kesehatan	DKBP3A, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Kecamatan, dan Desa.
		3. Persentase remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	45%	50%	58%	Dinas Kesehatan	DKBP3A, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Agama.
		4. Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	70%	75%	80%	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, DKBP3A, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Kecamatan, dan Desa.
		5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	70%	75%	80%	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, DKBP3A, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
			2022	2023	2024		
							Desa, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kecamatan, dan Desa.
		6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	70%	80%	90%	Dinas Kesehatan	DKBP3A, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
		7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	70%	80%	90%	Dinas Kesehatan	DKBP3A, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
		8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	70%	80%	90%	Dinas Kesehatan	DKBP3A, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
		9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan	DKBP3A, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
2.	Tersedianya layanan intervensi sensitif	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.	50%	60%	70%	DKBP3A	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
		2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	15,5%	15,5%	15,5%	DKBP3A	Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Kecamatan, dan Desa.
		3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	80%	85%	90%	DKBP3A	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Agama, Kecamatan, dan Desa.
		4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di Kabupaten lokasi prioritas.	81 %	83 %	100%	DPUTRPRKP	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DKBP3A, Kecamatan, dan Desa.

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
			2022	2023	2024		
		5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di Kabupaten lokasi.	80%	85%	90%	DPUTRPRKP	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
		6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	411.437 Penduduk	415.767 Penduduk	433.091 Penduduk	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
		7. Cakupan keluarga beresiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan pendampingan	90%	90%	90%	DKBP3A	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
		8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.			10.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Desa.
		9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	60%	65%	70%	Dinas Kesehatan	DKBP3A, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
		10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	39.795	45.459	15.600.039	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BAPPEDA, DKBP3A, Dinas Pertanian, Kecamatan, dan Desa.
		11. Persentase Desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF).	80%	90%	90%	Dinas Kesehatan	DKBP3A, DPUPRTRKP, dan Desa.

B. Uraian Pilar Percepatan Penurunan *Stunting*

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
		2022	2023	2024		
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa						
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i>	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di Kabupaten.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap Tahun	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap Tahun	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap Tahun	Sekretaris Daerah	BAPPEDA dan Pemangku Kepentingan.
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Kabupaten.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap Tahun	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap Tahun	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap Tahun	Bupati	Sekretaris Daerah, BAPPEDA, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Terselenggaranya rembuk <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap Tahun	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap Tahun	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap Tahun	Camat	Dinas Kesehatan, DKBP3A, Kecamatan, dan Desa.
	4. Tersedianya Kebijakan/Peraturan Bupati tentang kewenangan Desa/Kelurahan dalam penurunan <i>Stunting</i> .	Target: seluruh Kabupaten Tahun: 2022	-	-	Bupati	DKBP3A, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Tersedianya bidan Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan.	75%	85%	100%	Bupati	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	6. Jumlah Desa/Kelurahan bebas <i>Stunting</i> .	75%	85%	100%	Bupati	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, DKBP3A, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
		2022	2023	2024		
b. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Seluruh Desa	Seluruh Desa	Seluruh Desa	Bupati	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, DKBP3A, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	22.500	20.000	Semua Pendamping	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Desa/Kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.	70%	80%	90%	Bupati	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 2: Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat						
a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1. Terlaksananya kampanye pencegahan nasional <i>Stunting</i> .	3 kanal/metode/Tahun setiap bulan	3 kanal/metode/Tahun setiap bulan	3 kanal/metode/Tahun setiap bulan	Bupati	Dinas Kesehatan, DKBP3A, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	90%	90%	90%	Bupati	DPUTRPRKP, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	70%	70%	70%	Bupati	Dinas Kesehatan, DKBP3A Kecamatan, Desa dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90%	90%	90%	Bupati	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
		2022	2023	2024		
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten.	75%	85%	90%	Bupati	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).	60%	65%	70%	BUPATI	Disdikpora dan Pemangku Kepentingan.
	3. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.	90%	90%	90%	BUPATI	Dinas Kesehatan, DKBP3A Dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase Desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	90%	90%	90%	BUPATI	DKBP3A, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	90%	90%	90%	BUPATI	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	90%	90%	90%	BUPATI	DKBP3A, Dinas Kesehatan, Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
		2022	2023	2024		
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.	minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap Tahun	minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap Tahun	minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap Tahun	Bupati	Kementerian Agama dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> .	90%	90%	90%	Kementerian Agama	Bupati dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah Kabupaten/KOTA dan Pemerintah Desa						
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.	1. Persentase Kecamatan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	100%	100%	100%	BUPATI	BAPPEDA dan Pemangku Kepentingan
	2. Persentase Desa/Kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa/Kelurahan (RPJM Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta APB Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	100%	100%	100%	Bupati	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, DKBP3A, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
		2022	2023	2024		
	3. Persentase Desa/Kelurahan yang meningkatkan alokasi dana Desa/Kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> .	90%	90%	90%	Bupati	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase Desa/Kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	80%	90%	100%	Bupati	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	80%	90%	100%	Bupati	Dinas Kesehatan, DPUPRTRKP, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase calon pengantin calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	90%	90%	90%	Bupati	DKBP3A, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, dan Pemangku Kepentingan .
	7. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Bupati	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	75%	80%	80%	Bupati	Dinas Kesehatan, DKBP3A, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Kecamatan, dan Desa.
	9. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	70%	75%	80%	Bupati	Dinas Kesehatan, DKBP3A, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kecamatan, dan Desa.

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
		2022	2023	2024		
	10. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	70%	75%	80%	Bupati	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, DKBP3A, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kecamatan, dan Desa.
	11. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	70%	80%	90%	Bupati	Dinas Kesehatan, DKBP3A, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	70%	80%	90%	Bupati	Dinas Kesehatan, DKBP3A, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
	13. Persentase Kabupaten yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	75%	75%	100%	Bupati	DKPKP, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	14. Persentase Kabupaten yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	100%	-	-	Bupati	DKBP3A, dan Pemangku Kepentingan.
b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	90%	90%	90%	Bupati	DKBP3A, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
		2022	2023	2024		
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	90%	90%	90%	Bupati	DKBP3A, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	90%	90%	90%	Bupati	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil <i>surveilans</i> keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	1 Tahun: setiap 6 bulan	1 Tahun: setiap 6 bulan	1 Tahun: setiap 6 bulan	Bupati	DKBP3A dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Kabupaten dengan <i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.	90%	90%	90%	Bupati	DKBP3A dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	50%	60%	70%	Bupati	DKBP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Desa.
	7. Persentase <i>Unmeet Need</i> pelayanan keluarga berencana	7,4%	7,4%	7,4%	Bupati	DKBP3A dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat						
a. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	50%	50%	50%	Bupati	Dinas Pertanian, DKPKP, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	90%	90%	90%	Bupati	Dinas Kesehatan, DKPKP, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
		2022	2023	2024		
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI).	90%	90%	90%	Bupati	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	90%	90%	90%	Bupati	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai.	90%	90%	90%	Bupati	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	90%	90%	90%	Bupati	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	75	75	75%	Bupati	Dinas Kesehatan, DKPKP, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
		2022	2023	2024		
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi						
a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	90%	90%	90%	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BAPPEDA dan Pemangku Kepentingan.
	2. Publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten.	1 (satu) publikasi Tahun: setiap Tahun	1 (satu) publikasi Tahun: setiap Tahun	1 (satu) publikasi Tahun: setiap Tahun	Dinas Kesehatan	Bupati
	3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	minimal 2 (dua) kali setiap Tahun	minimal 2 (dua) kali setiap Tahun	minimal 2 (dua) kali setiap Tahun	DKBP3A	BAPPEDA
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah Provinsi.	minimal 2 (dua) kali setiap Tahun	minimal 2 (dua) kali setiap Tahun	minimal 2 (dua) kali setiap Tahun	Bupati	BAPPEDA
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah Kabupaten.	minimal 2 (dua) kali setiap Tahun	minimal 2 (dua) kali setiap Tahun	minimal 2 (dua) kali setiap Tahun	Bupati	BAPPEDA
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa.	minimal 2 (dua) kali setiap Tahun	minimal 2 (dua) kali setiap Tahun	minimal 2 (dua) kali setiap Tahun	Pemerintah Desa	BAPPEDA
	7. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	50%	50%	50%	Bupati	Dinas Kesehatan, DKBP3A dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
		2022	2023	2024		
b. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana Desa/Kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi.	1	1	1	BKAD	BAPPEDA dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1	1	1	BAPPEDA	Bupati dan Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	1	1	1	DKBP3A	DKBP3A dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	1	1	1	DKBP3A	Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dan Bupati.
	5. Persentase Desa/Kelurahan yang mengimplementasikan sistem data <i>surveilans</i> gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> .	100%	100%	100%	Bupati	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
c. melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Persentase Desa/Kelurahan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	100%	100%	100%	DKBP3A	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Pemangku Kepentingan.
d. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	1. Tersusunnya platform berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1	1	1	BAPPEDA	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian			Penanggung Jawab	PD/Lembaga/Pihak Pendukung
		2022	2023	2024		
	2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1	1	1	BAPPEDA	-
	3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi.	1	1	1	BKAD	BAPPEDA dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1	1	1	BKAD	BAPPEDA dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010